

TESIS

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)**

***THE EFFECT OF FINANCIAL INDEPENDENCE AND CAPITAL
EXPENDITURE ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH
ECONOMIC GROWTH AS MODERATING VARIABLES
(Study on Regional Government of South Sulawesi Province)***

**MAHARDIKA BURHAN
A062201011**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)**

***THE EFFECT OF FINANCIAL INDEPENDENCE AND CAPITAL
EXPENDITURE ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH
ECONOMIC GROWTH AS MODERATING VARIABLES
(Study on Regional Government of South Sulawesi Province)***

disusun dan diajukan oleh

**MAHARDIKA BURHAN
A062201011**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN)

disusun dan diajukan oleh

MAHARDIKA BURHAN
A062201011

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal **09 Januari 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Hj. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196503051992032001

Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA., CA.
NIP. 196608221994031009

Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Aini Indriyawati, SE., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mahardika Burhan
Nim : A062201011
Jurusan/ program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis/disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Mahardika Burhan

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi Studi pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekono dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., AK., CA. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Darwis Said, S.E., AK., M.SA., CA. selaku pimbimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing,

memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc,Sc., CA., Bapak Dr.Amiruddin, SE., Ak., M.Si.,CA dan Bapak Afdal, SE.,M.Sc.,Ph.D.,Ak.,CA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
5. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada ayahanda tercinta Alm. Drs. H. Burhanuddin M.DIAH dan ibunda Hj. Munawarah S.Pd.I yang senantiasa menyertai peneliti dengan doa dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang kepada peneliti selama ini.
6. Seluruh dosen Magister Akuntansi dan pegawai akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis, segala bantuan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua budi baik dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan anugrah-Nya atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata penelitian berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manardika Burhan', written in a cursive style.

Manardika Burhan

ABSTRAK

MAHARDIKA BURHAN. *Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)* (dibimbing oleh **Kartini** dan **Darwis Said**).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 kabupaten/ kota dengan tahun pengamatan 2016 hingga 2020. Jenis sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana populasi sebagai sampel sehingga sampel yang dapat diolah sebanyak 120 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Statistical Program for Social Science ver. 25. Pengumpulan data menggunakan teknis dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga, pertumbuhan ekonomi memperkuat dalam memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan daerah. Keempat, pertumbuhan ekonomi memperkuat belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah di kabupaten/ kota Povinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

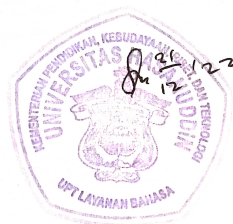
MAHARDIKA BURHAN. *The Influence of Financial Independence and Capital Expenditure on Financial Performance with Economic Growth as a moderating variable. (Study on Regional Government of South Sulawesi Province) (supervised by Kartini and Darwis Said).*

This study aims to examine and analyze the effect of financial independence and capital expenditure on financial performance with economic growth as the moderating variable.

The population in this study was 24 districts/cities in South Sulawesi Province, with the years of observation from 2016 to 2020. The type of sample used was a saturated sample, where the population was the sample, so 120 samples could be processed. The data used in this study uses secondary data that comes from the website of the Ministry of Finance, Directorate General of Fiscal Balance. The data was then analyzed using the Statistical Program for Social Science ver. 25. Data collection uses technical documentation, namely data collection in the form of documents that have something to do with the data needed. The analysis technique used is multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that: First, financial independence has a positive and significant effect on the financial performance of local governments. Second, capital expenditure has a significant positive effect on the financial performance of local governments. Third, economic growth strengthens in moderating self-reliance on regional financial performance. Fourth, economic growth strengthens capital expenditures on the government's financial performance in the districts/cities of South Sulawesi Province.

Keywords : *Financial Independence, Capital Expenditure, Financial Performance, Economic Growth*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep.....	14
2.1.1 <i>Goal Setting Theory</i>	14
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik	15
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
2.1.4 Kemandirian Keuangan	19
2.1.5 Belanja Modal.....	20
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi	23
BAB III KERANGKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	23
3.1 Kerangka Pikir.....	23
3.2 Hipotesis	24
3.2.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
3.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..	30
BAB IV METODE PENELITIAN	33
4.1 Rancangan Penelitian	33
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	34
4.4 Jenis dan Sumber Data	35
4.5 Metode Pengumpulan Data	36
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
4.6.1 Variabel Bebas atau <i>Independent Variable</i>	36

4.6.2	Variabel Terikat atau <i>Dependent Variable</i> Error! Bookmark not defined.	
4.6.3	Variabel Moderasi.....	39
4.7	Teknik Analisis Data.....	40
4.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	40
4.7.2	Uji Asumsi Klasik	41
4.7.3	Uji Hipotesis.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN.....		44
5.1	Deskripsi Data.....	44
5.1.1	Gambaran Umum	44
5.1.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	44
5.1.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	47
5.1.4	Uji Regresi.....	50
BAB VI PEMBAHASAN		53
6.1	Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	54
6.2	Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	56
6.3	Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan.....	57
6.4	Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.....	58
BAB VII PENUTUP.....		82
7.1	Kesimpulan	82
7.2	Implikasi	83
7.3	Keterbatasan Penelitian	84
7.4	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN.....		69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	6
Tabel 4.1 Populasi dan Sampel	34
Tabel 5.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
Tabel 5.2 Uji Normalitas.....	47
Tabel 5.3 Uji Multikolinearitas	48
Tabel 5.4 Uji Autokorelasi	49
Tabel 5.5 Uji Heteroskedastiisitas	50
Tabel 5.6 Regresi Linear Berganda	50
Tabel 5.7 Analisis Regresi Moderasi.....	52
Tabel 6.1 Ringkasan Hasil Penelitian.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hasil Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan.....	6
Gambar 1.2 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020	9
Gambar 3.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Teori	69
Lampiran 2. Tinjauan Empiris Penelitian	92
Lampiran 3. Validasi Ijin Penelitian	102
Lampiran 6. Tabulasi Data.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk diukur. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya, salah satu bentuknya adalah kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2019). agen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal dan hal ini akan berpengaruh kepada kinerja organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (2006) Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya kepada publik untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Halim (2012), “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Adanya tuntutan oleh masyarakat akan bentuk pertanggungjawaban tentang kinerja keuangan, pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (2004) Nomor 32/2004. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan, mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai:

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan.
2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan.
3. Alat komunikasi dengan publik

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan Sari (2016).

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dilakukan melalui penilaian yang sistematis bukan hanya pada input, tetapi juga pada output, dan benefit, serta impact (dampak) yang ditimbulkan. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan dasar yang reasonable untuk pengambilan keputusan dan melalui pengukuran kinerja akan dapat dilihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan dan dapat juga untuk mengukur kecenderungan dari tahun ke tahun. Halim (2002) menyatakan rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pinjaman.

Pemberian otonomi yang luas, membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada

kepentingan publik. Pemerintah (2000) Nomor 105/2000 pasal 4 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan daerahnya dan pelayanan kepada sosial masyarakat.

Otonomi bertujuan untuk dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan sehingga masyarakat bisa mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi ini diatur dalam peraturan pemerintah RI (2005) Nomor 24/2005. Dalam kerangka

konseptual standar akuntansi pemerintah salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan lengkap *full disclosure*, dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada catatan atas laporan keuangan.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, yang meliputi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam mewujudkan kemandirian keuangan Pemerintah dituntut untuk mampu membiayai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjaman. Pastinya diharapkan kemandirian Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dengan tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) atau PAD dalam membiayai kebutuhan daerah serta mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi pemerintah pusat dalam mendanai pembangunan daerah sehingga dapat

memakmurkan warga yang ada di daerahnya dan mampu melaksanakan pemerintahannya dengan mandiri. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut agar bisa mengatur pendapatan daerah, kekayaan daerah dan juga aset daerah demi kemakmuran masyarakat yang ada.

Pedoman untuk melihat pola hubungan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel di bawah :

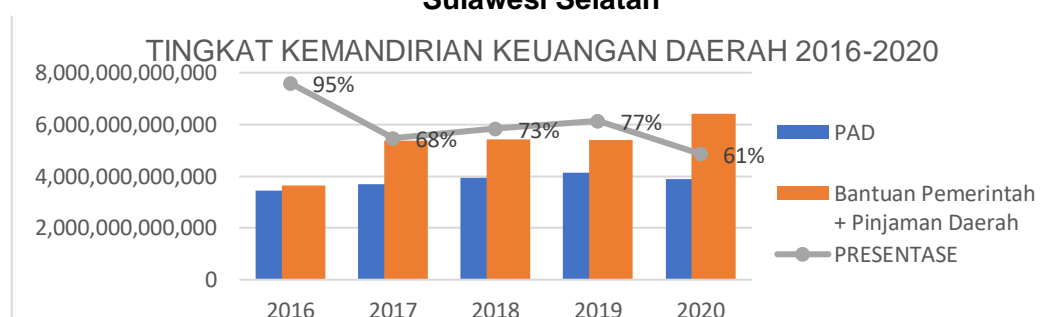
Tabel 1.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konsultatif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Sudaryo dkk. 2017:12)

Perhitungan hasil rasio kemandirian keuangan daerah, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kemandirian yang masih terbilang sedang, hal tersebut dibuktikan dari tabel berikut:

Gambar 1.1 Hasil Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber data : (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Berdasarkan Grafik tersebut maka bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dan dapat dilihat mulai dari tahun 2016-2020 terjadi penurunan secara drastis mengenai Kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam

membayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. dilihat dari grafik kemandirian kemandirian keuangan daerah tahun 2016 sebesar 95% dikategorikan Delekatif yang berarti kemampuan keuangan daerah itu tinggi. Namun menurun secara drastis di tahun 2017 sebesar 68% di kategorikan Partisipatif berarti kemampuan daerah tersebut sedang, di tahun 2018-2019 mengalami kenaikan secara terus menerus 73% sampai 77% dan mengalami penurunan secara drastis yaitu 61% sehingga menunjukkan pola Partisipatif berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Walaupun dalam grafik kemandirian keuangan ukuran tingkat kemandirian keuangan menunjukkan pola Partisipatif yaitu sedang, akan tetapi mengalami penurunan secara terus menerus mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dan tidak bisa semandiri mungkin.

Dalam penelitian Mahardika dan Artini, (2014) menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Suci, dkk. (2014) Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2001 – 2011. Namun, penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Sutrisna (2019) menjelaskan bahwa variable Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada 4 kawasan kota Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan pada tahun 2011 – 2016.

Penurunan pengalokasian anggaran untuk belanja modal salah satunya disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

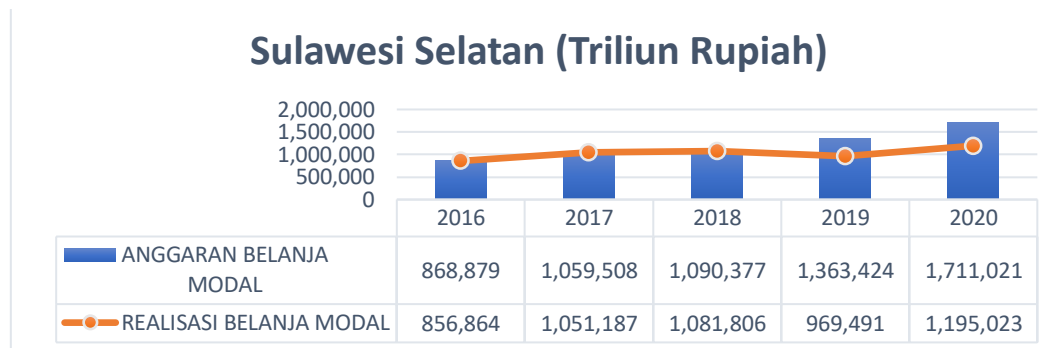
daerah, sehingga APBD sebagian besar dialokasikan untuk keperluan belanja tidak langsung (Badrudin, 2011). Selain dilihat dari pengeluaran pemerintahnya, dalam alokasi pendapatan pemerintah untuk pendapatan pada transfer pemerintah pusat baik DAU ataupun DAK masih cenderung tinggi.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) (2005) No. 58/2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Belanja modal meliputi antara lain adalah belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya Badrudin dkk. (2012).

Belanja modal merupakan belanja yang produktif yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam menyusun anggarannya pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mardiasmo (2019) .

Besarnya alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan digambarkan berikut ini.

Gambar 1.2 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020



Sumber data : (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Dari data di atas dapat disimpulkan sementara bahwa belanja modal sebagai pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan daerah dapat ditingkatkan pemerintah daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2018, namun di tahun 2019 mengalami penurunan persentase realisasi dan anggaran belanja modal yang sangat signifikan sebesar 41% dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 sebesar 43%. Walaupun Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian akan tetapi anggaran juga menjadi patokan apakah suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya, Dapat dilihat pada tahun 2019 hingga 2020 realisasi belanja modal mengalami penurunan yang menunjukkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kekayaan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan telah mengungkap beberapa determinan. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk. (2016:37) mengemukakan bahwa semakin meningkatnya alokasi belanja modal maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Sari dkk. (2020:223) Mengatakan dalam penelitiannya bahwa

belanja modal secara parsial berdampak secara relevan ke Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan Sari dan Mustanda (2019:4782), Mulyani dan Wibowo (2017:65) dan Leki dkk. (2018:168) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya belanja modal rendah maka rasio efisiensi yang dihasilkan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018:1106) menemukan hasil yang berbeda bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali, sejalan dengan penelitian Fernandes dan Putri (2022:206) Darwanis Saputra (2014:194), Nugroho dan Rohman (2012:11) bahwa belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Raharja dkk. (2017). Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri (2006) Nomor 13/2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Halim (2002:126–27).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, maupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (Gross Domestic Product) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Laju pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan produktivitas nasional dengan dana investasi dalam maksimalisasi total produksi dapat mendorong tingkat laju pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel moderasi untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian Antari dan Sedana (2018) dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan variabel yang berbeda yaitu Pendapatan Asli Daerah diubah menjadi variabel Kemandirian Keuangan. Alasannya, karena dengan Semakin tinggi kemandirian keuangan menunjukkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan demikian pula sebaliknya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Holung, dkk (2021) menyatakan bahwa Kemandirian, Kinerja Keuangan dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selaras dengan penelitian Mahardika dan Artini, (2014) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan yang kurang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Mengacu pada realisasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anggarannya, dimana Pendapatan Asli daerah belum mampu untuk menutupi total belanja daerahnya dan Peningkatan belanja modal untuk

pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu kemandirian daerah akan terwujud bila kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) atau sumber-sumber penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah semakin membaik adapun daerah yang masih kekurangan akan diberikan bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat berbagai sumber potensial pendapatan asli daerah menjadi indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri.

Penggunaan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja keuangan merujuk pada penelitian Nurhayati dan Hamzah (2020) Berpendapat bahwa Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan besarnya tingkat potensi daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dengan banyaknya hasil penelitian yang belum konsisten sehingga memotivasi peneliti melakukan penelitian kembali dengan mengenai “Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi Studi pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian serta memiliki konsistensi dengan permasalahan dan pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan permasalahan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu:

1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang bermanfaat untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kemandirian keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kontribusi Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

Tinjauan teori adalah penegasan landasan teori yang dipilih peneliti dalam penelitiannya, serta definisi yang disusun secara sistematis yang mendukung dan menjelaskan variabel penelitian. Landasan teori sangat penting karena menjadi landasan yang kuat dalam menjelaskan fenomena penelitian. Adapun teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi. Konsep dasar dari seluruh teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

2.1.1 *Goal Setting Theory*

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) awalnya dikemukakan oleh Locke, (1968) yang mengatakan adanya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). *Goal setting theory* merupakan salah satu bentuk teori motivasi. Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan oleh organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya.

Teori ini menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan

melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan *goal setting theory*, laporan keuangan pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel kemandirian keuangan dan belanja modal adalah sebagai faktor penentu. Jika faktor-faktor ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950- an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan teknologi.

Teori pertumbuhan ekonomi Neo klasik merupakan salah satu model pertumbuhan yang banyak menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran Chandra dkk. (2017). Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Analisis Solow selanjutnya membuat formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut. Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Teori ini dikembangkan oleh Solow, merupakan penyempurnaan teori klasik. Fokus pembahasan teori neo klasik adalah tentang akumulasi modal. Asumsi-asumsi dari model Solow antara lain Rahardja dan Manurung (2008:148-149) :

- 1) Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi),
- 2) Tingkat depresiasi dianggap konstan,
- 3) Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal,
- 4) Tidak ada sektor pemerintah,
- 5) Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja,

Sehingga jumlah penduduk-jumlah tenaga kerja. Dalam asumsi mempersempit faktor penentu pertumbuhan yang hanya menjadi barang modal dan tenaga kerja.

Pada teori ini memusatkan tiga faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan bisa memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi, (2019:25) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil perolehan dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan berkaitan dalam penggunaan anggaran daerah dengan menilai efisiensi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai alat ukur

kemampuan daerah. Dan menurut Sudaryo *dkk.*, (2017:8) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*)
- 5) Memotivasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dan data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran kemampuan pemerintahan daerah berdasarkan kinerja di masa lalu dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan analisis rasio keuangan pada realisasi pengelolaan APBD, dimana dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian (otonomi fiskal).

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) mengemukakan bahwa kinerja

keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Halim (2002). Selain itu menunjukkan besarnya ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Tahar dan Zakhya (2011) menyatakan bahwa terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah.
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi.

- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.1.4 Kemandirian Keuangan

Terdapat beberapa definisi kemandirian keuangan yang digunakan dalam beberapa literatur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun (2004) menjelaskan bahwa: “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi”.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232).

Tujuan pengukuran kemandirian keuangan mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Handayani & Erinoss, (2020) menyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumberdana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, yang meliputi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, (Setiawan dkk. 2021). Dalam mewujudkan kemandirian keuangan Pemerintah dituntut untuk mampu membiayai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Kustianingsih & Kahar, (2018) mengemukakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan Bagi Hasil Daerah.

Jadi dapat disimpulkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah terhadap pemerintah pusat serta diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah setara dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Effendi, (2021:61) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan menurut Kawatu, (2019:119) menyatakan bahwa belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Fitra (2019:41) mengatakan belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Menurut Afiah dkk., (2019:63) Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (2006) Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dalam anggaran pengeluaran tersebut termasuk nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang dianggarkan yang sebesar harga beli bangunan aset tetapi tidak termasuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset karena telah dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya Nasution (2019:72).

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (2007) Pasal 53 Nomor

59/2007 dinyatakan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dengan demikian, belanja honor/upah (yang semula dianggarkan di dalam belanja pegawai) dan belanja-belanja barang jasa (seperti ATK, perjalanan dinas) yang terkait langsung dengan pengadaan aset tetap berwujud harus dianggarkan di dalam belanja modal.

Belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk kemandirian dalam pengelolaan rumah tangganya. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung

terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan dengan tersedianya fasilitas para investor juga akan tertarik untuk menanam modal di daerah itu. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi di daerah yang berarti meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Raharja, (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dan menurut Sukirno, (2012) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi itu sendiri sebab di dalam pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi.

Menurut George H. Bort, (1960) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antara daerah.

Menurut Jhingan, (2010) mengatakan bahwa dilaksanakannya pembangunan daerah akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi disuatu daerah akan adanya peningkatan maupun penurunan di masing-masing sektor ekonomi di daerah tersebut Peningkatan dan penurunan masing-masing sektor ekonomi tersebut disebut sebagai transformasi structural atau perubahan struktur ekonomi dalam jangka waktu tertentu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.
5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal Nasution (2019). PDRB berdasarkan pengertian BPS (Badan Pusat Statistik) merupakan jumlah nilai

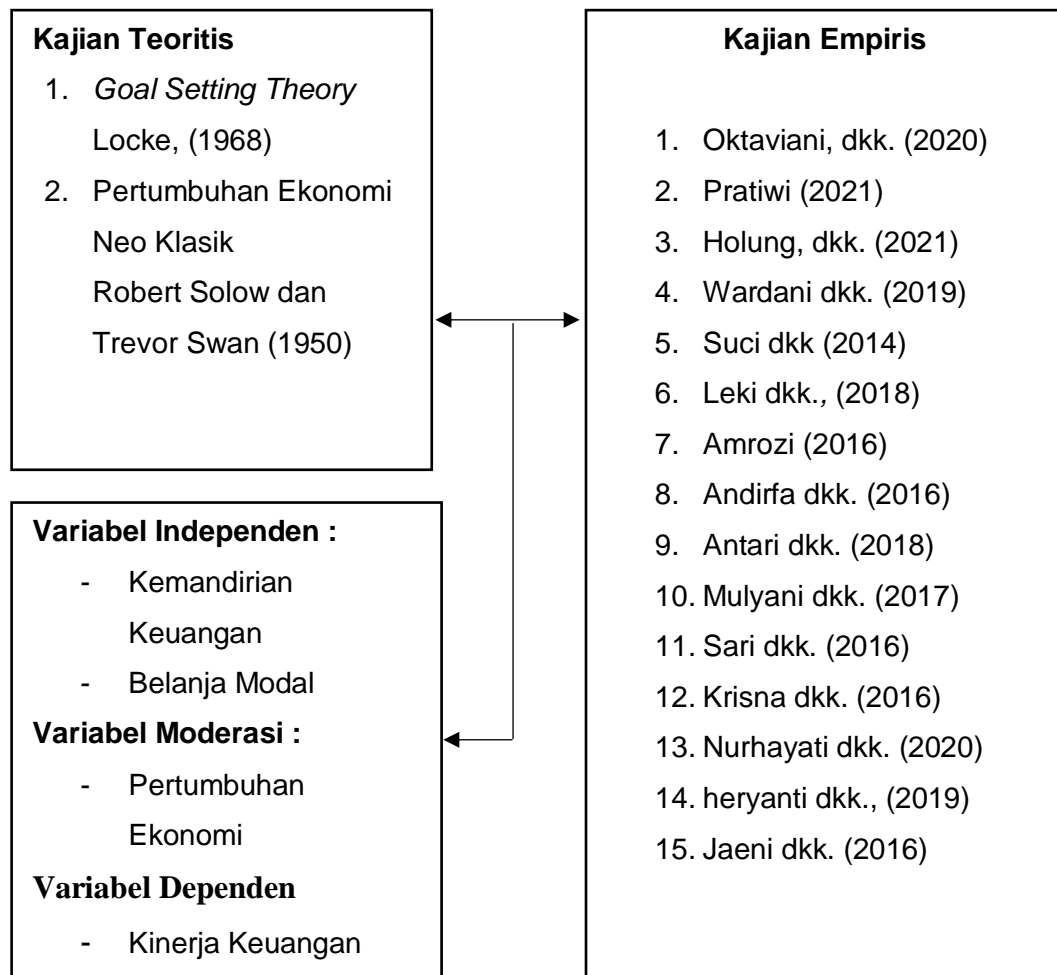
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB ini dapat didasarkan pada harga konstan. PDRB berdasarkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu.

BAB III

KERANGKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Pikir

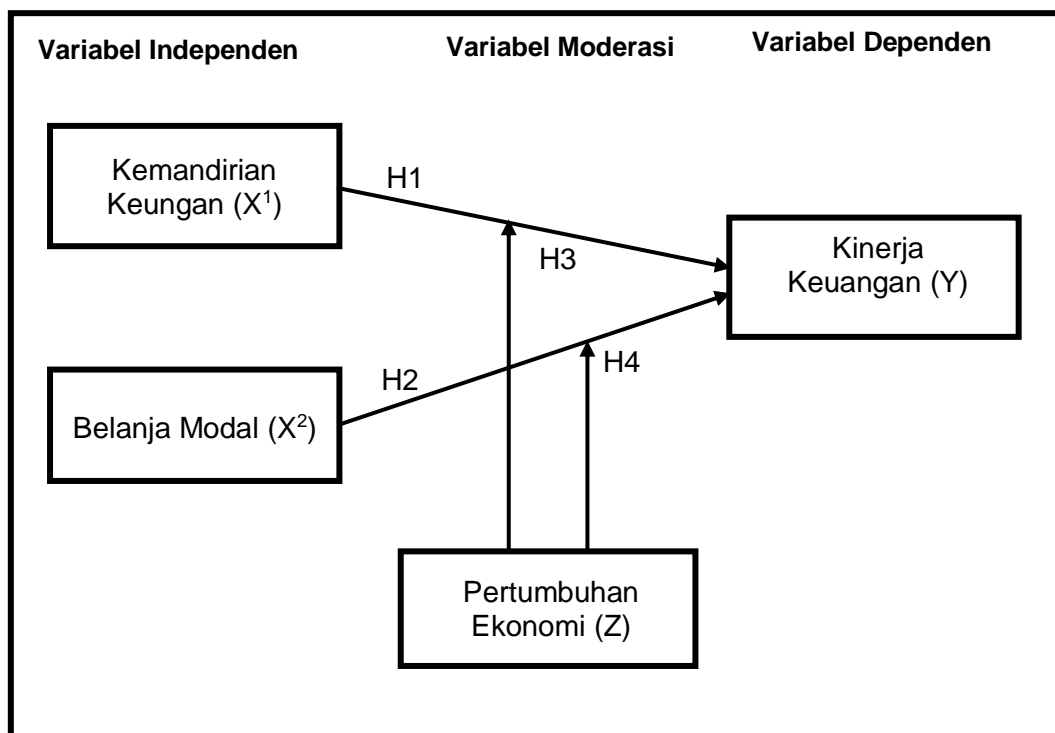
Berdasarkan landasan teori dan tinjauan empiris yang telah dijelaskan, maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian. Pengembangan kerangka pemikiran dijabarkan melalui dengan berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Kerangka konseptual juga merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen meliputi Kemandirian Keuangan dan

Belanja Modal sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan Variabel Moderasinya adalah Pertumbuhan Ekonomi. Keterkaitan antara variabel dapat dilihat pada kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis, relevansi penelitian dan kerangka berpikir maka penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut :

3.2.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik, yaitu kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran para tenaga kerja, bukan ditentukan oleh penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori *goal setting* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Tuntutan akuntabilitas atas Lembaga-lembaga publik, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan *goal setting theory*, laporan keuangan pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel kemandirian keuangan adalah sebagai faktor penentu. Jika faktor-faktor ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai.

Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) mencerminkan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan serta pelayanan bagi masyarakat yang sudah taat pajak serta retribusi sebagai sumber yang dibutuhkan daerah. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari besar kecilnya suatu pendapatan asli daerah. Berbeda dengan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain seperti halnya pinjaman ataupun dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian Wardani dkk. (2019) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan hasil penelitian berbeda dengan Suci dkk. (2014) dan Holung dkk. (2021) menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Pertumbuhan Ekonomi. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Oktaviani dkk. (2020) menemukan bahwa semakin tinggi kemandirian suatu daerah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan kemandirian daerah tersebut akan terwujud bila kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) atau sumber-sumber penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah semakin membaik. Adapun untuk daerah yang masih kekurangan akan diberikan bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. berbagai sumber potensial pendapatan asli daerah yang menjadi indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri. Halim (2007) mengemukakan bahwa Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui kemandirian yang dilakukan daerah dengan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi yang serta diharapkan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, semua daerah dalam melakukan urusan daerah baik itu urusan pemerintahan maupun urusan dalam pembangunan dapat mengadakan keuangan daerah masing-masing yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

H1 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi dan persediaan modal yang selanjutnya diharapkan meningkatkan kemajuan teknologi dan

menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong peningkatan jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yang selanjutnya menurunkan akumulasi modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dalam menambah aset atau kekayaan daerah. Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah maka akan memberikan umpan balik peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan dari investor sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Amrozi (2016), Mulyani dkk. (2017:65) dan Leki dkk. (2018:168) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antari dkk. (2018:1106) menemukan hasil yang berbeda bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jadi untuk untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum dalam menyusun anggarannya pada era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan anggaran belanja modal, pemerintah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik dikarenakan belanja modal merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam perekonomian yang ditunjukkan dari bertambahnya produksi barang atau jasa serta kemakmuran masyarakat yang meningkat. Pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan didukung oleh Pada Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik, yaitu kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran para tenaga kerja, bukan ditentukan oleh penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Andayani (2004) serta Sobel dan Holcombe (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami hal yang sama, kemandirian keuangan menjadi semakin rendah dikarenakan adanya ketergantungan dengan pemerintah pusat, peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan sumber daya manusia bagi daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) mencerminkan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan serta pelayanan bagi masyarakat yang sudah taat pajak serta retribusi sebagai sumber yang dibutuhkan daerah. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari besar kecilnya suatu pendapatan asli daerah.

Berbeda dengan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain seperti halnya pinjaman ataupun dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Purbadharmaja (2014) menunjukkan bahwa dengan terciptanya kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini sangat menentukan kemandirian keuangan daerah. Menurut Holung, dkk. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Sedangkan dalam penelitian Wardani, dkk. (2009) Menyatakan bahwa kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga digunakan untuk menanggulangi pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah keuangan, berupa kebijakan fiskal yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah. Apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tinggi maka kinerja keuangan daerah tersebut akan menurun. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial Belanja Modal menurut Halim (2007:101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan didukung oleh Teori pertumbuhan ekonomi klasik, menyatakan bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan "batas maksimum" bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Dalam penelitian Amrozi (2016), Mulyani dkk., (2017:65) dan Leki dkk., (2018:168) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sari dkk. (2019) Menemukan bahwa Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung. Badjra dkk., (2017:37) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan adanya belanja modal menjadi salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif.

Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan.